

**STRUKTUR WILAYAH PELAYANAN PERHUTANAN SOSIAL
DI KECAMATAN CENRANA**

Structure of Social Forestry Area in Cenrana Sub- district

ALI ARBAH



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**STRUKTUR WILAYAH PELAYANAN PERHUTANAN SOSIAL
DI KECAMATAN CENRANA**

Tesis
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

ALI ARBAH
NIM: M012211007

Kepada



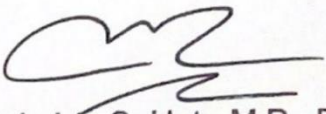
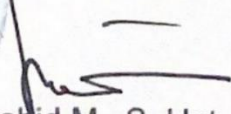
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PERSUTUJUAN**TESIS****STRUKTUR WILAYAH PELAYANAN PERHUTANAN SOSIAL
DI KECAMATAN CENRANA****ALI ARBAH
NIM: M012211007**

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Magister Program Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

pada tanggal 14 Juni 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui**Pembimbing Utama****Pembimbing Pendamping**
Prof. Dr. Supratman, S. Hut., MP
NIP. 19700918199702 1 001
Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, MS
NIP. 19590420198503 1 002**Ketua Program Studi Magister
Ilmu Kehutanan**
Mukrimin., S. Hut., M.P., Ph. D
NIP. 19780209200812 1 001**Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin**
Dr. A. Mujetahid M., S. Hut., MP
NIP. 19690208199702 1 002

PERNYATAKAN KEASLIAN TESIS DAN KELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Struktur Wilayah Pelayanan Perhutanan Sosial di Kecamatan Cenrana" adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing Prof. Dr. Supratman, S. Hut., MP sebagai Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, MS sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Juni 2024



Ali Arbah
M012211007

ABSTRAK

Ali Arbah. **Struktur Wilayah Pelayanan Perhutanan Sosial di Kecamatan Cenrana** (dibimbing oleh Supratman dan Syamsu Alam)

Akses jalan yang rusak, ketiadaan pasar di beberapa desa, dan minimnya akses terhadap teknologi merupakan tantangan bagi masyarakat sekitar hutan di Kecamatan Cenrana. Mengoptimalkan pusat-pusat pelayanan di lokasi perhutanan sosial (PS) dapat mendukung kegiatan perhutanan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis komoditi unggulan perhutanan sosial dan desa-desa serta struktur wilayah pelayanan perhutanan sosial di Kecamatan Cenrana. Analisis komoditi unggulan menggunakan location quotient (LQ), sedangkan analisis struktur wilayah menggunakan skalogram dan gravitasi. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa komoditi unggulan perhutanan sosial di KPS Nusantara Hijau adalah getah pinus dan madu. Di KPS Matajang, unggulan adalah tanaman agroforestri. KPS Malaka 01 unggul pada tanaman agroforestri, aren, ekowisata, dan madu. KPS Tanete Pammase unggul pada tanaman agroforestri, getah pinus, dan madu. KPS Sonrae unggul dalam aren dan madu, sementara KPS Abulo Sibatang unggul dengan getah pinus, aren, dan tanaman agroforestri. Komoditi unggulan di Desa Laiya meliputi madu, aren, pinus, dan porang; Desa Rompegading unggul pada kemiri, aren, dan sapi; Desa Limampoccoe pada kemiri dan sapi; Desa Cenrana Baru pada madu, aren, dan porang; Desa Lebbotenggae hanya unggul pada sapi; dan Desa Labuaja unggul pada madu dan aren. Berdasarkan analisis skalogram dan gravitasi, struktur wilayah perhutanan sosial di Kecamatan Cenrana menunjukkan Desa Limampoccoe sebagai pusat pelayanan tingkat kecamatan, menyediakan layanan pergudangan, pusat distribusi komoditi dan faktor-faktor produksi, quality control, serta pengemasan dan pemberian merek. Dusun Labuaja (Desa Laiya), Dusun Malaka (Desa Cenrana Baru), Dusun Bululohe (Desa Rompegading), dan Dusun Nahung (Desa Labuaja) berfungsi sebagai lokasi pasar lelang komoditi, uji coba lokal, penyuluhan, fasilitas budidaya madu, dan teknologi pengolahan produk turunan seperti aren, kemiri, porang, dan kopi. Infrastruktur jalan dan penunjuk arah objek wisata terletak di Dusun Malaka (Desa Cenrana Baru). Konflik di Desa Labuaja membutuhkan resolusi konflik dalam pengelolaan perhutanan sosial.

Kata Kunci: Pusat Pelayanan, Komoditi Unggulan, *Location Quotient*, skalogram, gravitasi.

ABSTRACT

Ali Arbah. **Service Area Structure of Social Forestry in Cenrana District**
(supervised by Supratman and Syamsu Alam)

Damaged roads, the absence of markets in several villages, and limited access to technology are challenges faced by communities around the forests in Cenrana District. Optimizing service centers in social forestry (PS) locations can support social forestry activities. This study aims to analyze the leading commodities of social forestry and villages, as well as the service area structure of social forestry in Cenrana District. The analysis of leading commodities used the location quotient (LQ), while the analysis of area structure used scalogram and gravity methods. The LQ analysis results indicate that the leading social forestry commodities in KPS Nusantara Hijau are pine resin and honey. In KPS Matajang, the leading commodities are agroforestry plants. KPS Malaka 01 excels in agroforestry plants, sugar palm, ecotourism, and honey. KPS Tanete Pammase excels in agroforestry plants, pine resin, and honey. KPS Sonrae excels in sugar palm and honey, while KPS Abulo Sibatang excels in pine resin, sugar palm, and agroforestry plants. The leading commodities in Laiya Village include honey, sugar palm, pine, and porang; Rompegading Village excels in candlenut, sugar palm, and cattle; Limampoccoe Village in candlenut and cattle; Cenrana Baru Village in honey, sugar palm, and porang; Lebbotenggae Village only excels in cattle; and Labuaja Village excels in honey and sugar palm. Based on the scalogram and gravity analysis, the social forestry area structure in Cenrana District indicates Limampoccoe Village as the sub-district service center, providing warehousing services, commodity distribution, quality control, and packaging and branding. Labuaja Hamlet (Laiya Village), Malaka Hamlet (Cenrana Baru Village), Bululohe Hamlet (Rompegading Village), and Nahung Hamlet (Labuaja Village) serve as locations for commodity auction markets, local trials, extension services, honey cultivation facilities, and processing technology for derivative products such as sugar palm, candlenut, porang, and coffee. Road infrastructure and directional signs for tourist attractions are located in Malaka Hamlet (Cenrana Baru Village). Conflict resolution is needed in Labuaja Village for the management of social forestry.

Keywords: Service Center, Leading Commodities, Location Quotient, Scalogram, Gravity.

Ucapan Terima Kasih

Saya bersyukur bahwa tesis ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan Prof. Dr. Supratman, S. Hut., MP sebagai Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, MS sebagai Pembimbing Pendamping. Saya mengucapkan berlimpah terima kasih kepada mereka. Penghargaan tertinggi juga saya sampaikan kepada Bapak Haudec Herrawan selaku Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat KPH Bulusaraung, Bapak Guruh Wahyu Martopo selaku Kepala BPS Maros, Pemerintah desa di Kecamatan Cenrana, seluruh kepala dusun di Kecamatan Cenrana dan seluruh ketua kelompok perhutanan sosial di Kecamatan Cenrana atas segala bantuan dan informasi yang diberikan selama proses penelitian hingga penyusunan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin dan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi saya menempuh program magister serta para dosen dan rekan-rekan dalam tim penelitian.

Akhirnya, kepada kedua orang tua tercinta saya yaitu ST. Patehang dan Muh. Ishang mengucapkan limpah terima kasih dan sembah sujud atas doa, pengorbanan dan motivasi mereka selama saya menempuh pendidikan. Penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat tercinta (Nur Athiqah Zhafirah, Risna, Aan, Hasanuddin, Dandy dan Ian Pradana) atas dukungan yang tak ternilai.

Penulis

Ali Arbah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN THESIS DAN KELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	4
2.1 Perhutanan Sosial	4
2.2 Pusat Pelayanan.....	5
2.2.1 Skalogram	6
2.2.2 Model Gravitasi.....	7
2.3 Komoditas Unggulan.....	7
2.3.1 Location Quotient (LQ)	9
2.4 Tinjauan Empiris	9
2.5 Kerangka Berpikir	12
BAB III METODE PENELITIAN	14
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian	14
3.2 Metode Pengumpulan Data	14
3.3 Analisis Data	15
3.3.1 Location Quotient (LQ).....	15
3.3.2 Analisis Skalogram.....	16
3.3.3 Analisis Gravitasi.....	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Deskripsi Umum Perhutanan Sosial di Kecamatan Cenrana	18
4.2 Analisis Komoditi Unggul.....	19
4.2.1 Komoditi Unggulan Perhutanan Sosial.....	19
4.2.2 Komoditi Unggulan Wilayah Kecamatan Cenrana.....	222

4.3 Analisis Struktur Wilayah Perhutanan Sosial.....	27
4.3.1 Analisis Kebutuhan Jenis Layanan.....	27
4.3.2 Struktur Wilayah	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	36
5.1 Kesimpulan	36
5.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
Tabel 1. Tinjauan Empiris	10
Tabel 2. KPS di Kecamatan Cenrana	18
Tabel 3. Nilai LQ Kelompok Perhutanan Sosial di Kecamatan Cenrana.....	19
Tabel 4. Nilai LQ Tiap Desa di Kecamatan Cenrana	22
Tabel 5. Perbandingan Nilai LQ KPS dan Desa-desa Kecamatan Cenrana.....	25
Tabel 6. Jenis Fasilitas dan Jumlah Fasilitas	28
Tabel 7. Hirarki Wilayah Pelayanan	34
Tabel 8. Jumlah Anggota disetiap KUPS.....	41
Tabel 9. Total anggota yang mengelola suatu komoditi dan total keseluruhan anggota KPS	42
Tabel 10. Nilai LQ Kelompok Perhutanan Sosial.....	42
Tabel 11. Jumlah Rumah Tangga yang Mengelola Komoditi Tiap Desa	44
Tabel 12. Nilai LQ setiap Desa di Kecamatan Cenrana	45
Tabel 13. Jumlah dan Jenis Fasilitas di Kecamatan Cenrana.	46
Tabel 14. Jenis Fasilitas yang telah dikonversi Menjadi angka "1" atau "0", Total Fasilitas dan Nilai <i>Error</i>	46
Tabel 15. Interval Kelas.....	48
Tabel 16. Orde Desa di Kecamatan Cenrana Hasil Analisis Skalogram.....	48
Tabel 17. Jarak antar Dusun dan Jumlah Penduduk di Desa Cenrana Baru.....	49
Tabel 18. Jarak antar Dusun dan Jumlah Penduduk di Desa Rompegading.....	49
Tabel 19. Jarak Antar Dusun dan Jumlah Penduduk di Desa Rompegading	49
Tabel 20. Jarak Antar Dusun dan Jumlah Penduduk di Desa Labuaja	49
Tabel 21. Nilai Gravitasi antar Dusun Desa Rompegading	50
Tabel 22. Nilai Gravitasi antar Dusun Desa Cenrana Baru	50
Tabel 23. Nilai Gravitasi antar Dusun Desa Laiya	50
Tabel 24. Nilai Gravitasi antar Dusun Desa Laiya	50
Tabel 25. Total Nilai Interaksi Dusun di Desa Rompegading.....	51
Tabel 26. Total Nilai Interaksi Dusun Desa Cenrana Baru	51
Tabel 27. Total Nilai Interaksi Dusun di Desa Laiya	51
Tabel 28. Total Nilai Interaksi Dusun di Desa Labuaja	51

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian	13
Gambar 2. Peta Administrasi Kecamatan Cenrana	14
Gambar 3. Peta Hirarki Pelayanan.....	36
Gambar 3. SK KUPS	52
Gambar 4 Kecamatan dalam Angka	55
Gambar 5. Ketua KPS Nusantara Hijau	56
Gambar 6. Ketua KPS Malaka 01	56
Gambar 7. Ketua KPS Sonrae	56
Gambar 8 Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Unit KPH Bulusaraung	57
Gambar 9. Kepala Badan Pusat Statistika Kabupaten Maros	57

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	Halaman
Lampiran 1. Analisis LQ KPS.....	41
Lampiran 2. Analisis LQ Desa	44
Lampiran 3. Analisis Skalogram	46
Lampiran 4. Analisis Gravitasi	49
Lampiran 5 SK KUPS KPS	52
Lampiran 6. Pedoman Wawancara.....	54
Lampiran 7. Data Fasilitas di Kecamatan Cenrana	55
Lampiran 8. Dokumentasi	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhutanan sosial (PS) adalah salah satu program yang mendukung pengentasan kemiskinan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Menurut sistem informasi GOKUPS Capaian PS nasional pada tahun 2023, mencakup luas area seluas 6.372.449 ha, dengan jumlah Kepala Keluarga yang menerima Unit Surat Keputusan (SK) sebanyak 1.288.004. Di Sulawesi Selatan, luas area PS mencapai 343.488,83 ha, dengan jumlah Kepala Keluarga penerima SK sebanyak 77.240.

Namun, capaian tersebut masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah infrastruktur ekonomi dan sosial yang kurang memadai. Keterbatasan tersebut mengakibatkan serapan produksi rendah, biaya produksi tinggi, sumber daya manusia kurang terampil, ditambah lagi kurangnya akses terhadap teknologi dan pendampingan yang menghambat petani dalam mencapai pasar yang lebih luas (Remmang,2021). Hasil penelitian Ardia (2023), Pemanfaatan sumberdaya hutan didukung peran fasilitasi intensif oleh pemerintah dalam peningkatan keterampilan, kapasitas kelembagaan, sarana prasarana usaha, dan akses pada sumber dana usaha secara signifikan mempengaruhi peningkatan pendapatan, kesempatan kerja yang adil, dan pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari.

Kecamatan Cenrana berdasarkan data GoKUPS Tahun 2023 luas kawasan hutan yang dikelola oleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Kecamatan Cenrana sebesar 1.745 ha dengan luas hutan Kemitraan Konservasi sebesar 287,99 ha, Hutan Kemasyarakatan sebesar 1415,6 ha dan Hutan Desa 42 ha. Masyarakat yang terdapat di Kecamatan Cenrana memanfaatkan kawasan hutan untuk menghasilkan beberapa komoditi seperti getah pinus, madu hutan, kemiri, buah-buahan, kopi dan sapi. Jumlah produksi komoditi getah pinus KPS Nusantara Hijau di Desa Laiya pada periode bulan Februari hingga Mei 2023 sebesar 20.243 kg dengan nilai produksi sebesar Rp 131.579.500. Pada komoditi sapi menurut BPS Maros pada tahun 2023 memiliki jumlah sebanyak 3.269 ekor. sedangkan komoditi buah-buahan memiliki jumlah produksi sebanyak 6.279 kwintal.

Akan tetapi, Komoditi-komoditi yang dikelola oleh masyarakat menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai. Hasil penelitian Nilla (2022), kondisi modal fisik pada KPS Nusantara Hijau termasuk dalam kategori rendah dengan nilai rata-rata 1,6. Pada modal fisik tersebut akses jalan di Desa Laiya pada KPS Nusantara Hijau diberikan nilai 1 dengan kategori rendah yang menunjukkan bahwa jalanan yang digunakan oleh masyarakat masih terdiri dari material bebatuan dan tanah yang menghambat masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari. Pada fasilitas umum mendapat penilaian 1,7 dengan kategori sedang. Tidak tersedianya pasar di desa membuat masyarakat sulit untuk menjual hasil komoditi yang mereka kelola. Selanjutnya, pendapatan perbulan anggota KPS Nusantara Hijau diberikan nilai 1,4 dengan kategori rendah yang menunjukkan bahwa pendapatan anggota KPS kurang dari 2 juta dan harus mampu mengelola penghasilan yang didapatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut pengelolaan PS di Kecamatan Cenrana menjadi belum optimal.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan pusat-pusat pelayanan yang menunjang kegiatan PS di desa-desa Kecamatan Cenrana. Hasil penelitian Musdalifah (2023), faktor pendorong (*driving force*) pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Cenrana Baru yaitu adanya sarana prasarana. Pada penelitian tersebut sarana Prasarana memiliki bobot 0,11 dengan nilai 4 menghasilkan skor 0,44 yang berarti sarana prasarana berpengaruh besar dan sangat penting dalam aspek kelola kawasan. Dengan adanya sarana prasarana dianggap sangat cukup untuk menunjang kegiatan pengelolaan PS di Desa Cenrana Baru.

Amalia (2019) Mengatakan penyediaan sarana dan prasarana dapat dilakukan 2 pendekatan (1) penyediaan berdasarkan kebutuhan (*demand approach*), (2) penyediaan yang dimaksud untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi (*supply approach*). Oleh karena itu maka dirumuskan struktur wilayah pelayanan perhutanan sosial di Kecamatan Cenrana dengan menentukan pusat pelayanan di tingkat kecamatan dan desa sesuai dengan kebutuhan PS pada setiap desa-desa berdasarkan komoditi unggulan PS dan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komoditi unggulan perhutanan sosial dan komoditi unggulan desa-desa di Kecamatan Cenrana?
2. Bagaimana struktur wilayah pelayanan perhutanan sosial di Kecamatan Cenrana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis komoditi unggulan perhutanan sosial dan komoditi unggulan desa-desa pada Kecamatan Cenrana
2. Menganalisis struktur wilayah pelayanan perhutanan sosial di Kecamatan Cenrana

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah ataupun pihak-pihak terkait dalam penentuan kebijakan khususnya program perhutanan sosial.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang serupa atau dalam bidang yang sama, serta juga untuk mengembangkan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perhutanan Sosial

Pengertian perhutanan sosial berdasarkan PERMENLHK No.9/2021 adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.

Suharjito dan Darusman (1998) mengatakan Kegiatan Perhutanan Sosial dapat didefinisikan sebagai bentuk kehutanan yang industrial (konvensional) yang dimodifikasi untuk memungkinkan distribusi keuntungannya kepada masyarakat. Konsep perhutanan sosial dapat dilaksanakan pada lahan hutan tradisional, khususnya pada kawasan hutan negara dan hutan adat. Oleh karena itu kita dapat memandang tujuan pengembangan perhutanan sosial dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar maupun di dalam kawasan hutan dengan turut serta memberdayakan sumber daya hutan yang ada (Edi, 2009).

Program Perhutanan Sosial sebagaimana terkandung dalam pasal 78 ayat 1 UU Desa merupakan bagian dari pembangunan desa dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Mengingat tujuan Perhutanan Sosial sebagai upaya kesejahteraan masyarakat, maka sangat penting dilaksanakan pendampingan kepada masyarakat sebagai upaya perwujudan fungsi perhutanan sosial, sehingga fungsi kelestarian dan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana. Dampak positif yang dirasakan masyarakat adalah peningkatan pendapatan, peluang kerja, akses pasar, dan jaringan (Rahayu, 2021).

2.2 Pusat Pelayanan

Tempat sentral atau lebih dikenal dengan pusat pelayanan menurut Walter Christaller (1893- 1969) merupakan wilayah yang menyajikan barang dan jasa bagi masyarakat di wilayah sekelilingnya dengan membentuk suatu hirarki berdasarkan jangkauan (range) dan ambang batas (threshold) penduduk (Muliana et al., 2018). Menurut Pane (2013) Pusat-pusat pelayanan adalah suatu aglomerasi dari berbagai kegiatan atau aktivitas, serta aglomerasi dari berbagai sarana dan prasarana yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah. Sedangkan Cahya dkk (2020) mengatakan pusat pelayanan merupakan pusat dari segala kegiatan-kegiatan antara politik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi. Kegiatan tersebut dijalankan melalui jasa pelayanan yang diberikan oleh fasilitas-fasilitas umum maupun sosial yang ada didalamnya. Jika dilihat dari fungsinya, pusat wilayah merupakan tempat sentral yang bertindak sebagai pusat pelayanan bagi daerah-daerah dibelakangnya dan penyuplai barang dan jasa bagi wilayah tersebut.

Perkembangan suatu jenis pusat pelayanan bergantung pada jumlah penduduk yang dilayani dan melayani. Peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan peningkatan kemampuan untuk melayani sehingga menimbulkan tingkatan-tingkatan diantara pemukiman dari suatu wilayah yang disebut sebagai *hierarchy of town* (Parare dalam Muliana Dkk, 2018).

Pada dasarnya pusat pelayanan memiliki hirarki. Hirarki tersebut ditentukan oleh (Budiharsono dalam Muliana dkk, 2018):

1. Jumlah penduduk yang bermukim pada wilayah tersebut
2. Jumlah fasilitas umum yang tersedia
3. Jumlah dan jenis fasilitas pelayanan umum yang tersedia

mengatakan bahwa semakin besar jumlah penduduk dan semakin banyak jumlah fasilitas serta jumlah jenis fasilitas pada suatu pusat maka semakin tinggi pula hierarki dari pusat tersebut. Dalam mendapatkan pelayanan sederhana seperti barang- barang kebutuhan dasar, seseorang dapat memperolehnya dari pusat-pusat yang berhierarki rendah. Sedangkan pelayanan pelayanan yang lebih tinggi dapat diperoleh pada wilayah yang berhierarki tinggi (Budiharsono dalam Muliana dkk, 2018).

Tujuan mengidentifikasi pusat pelayanan yaitu (Budiharsono dalam Muliana dkk, 2018):

1. Untuk mengetahui pusat-pusat pelayanan dan daerah pelayanan pada tingkat

yang berbeda.

2. Penentuan dari fasilitas infrastruktur pokok untuk memuaskan kebutuhan beragam sektor dari penduduk
3. Pengintegrasian atau pengelompokan pelayanan pada tingkat wilayah dan hubungannya dengan jaringan jalan

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pusat-pusat wilayah yaitu (Budiharsono dalam Muliana dkk, 2018):

1. Faktor lokasi ekonomi
Menjelaskan letak suatu wilayah yang strategis menyebabkan suatu wilayah dapat menjadi suatu pusat.
2. Faktor ketersediaan sumber daya
Menjelaskan bahwa ketersediaan sumber daya alam pada suatu wilayah akan menyebabkan wilayah tersebut menjadi pusat.
3. Kekuatan aglomerasi
Kekuatan aglomerasi terjadi karena ada sesuatu yang mendorong kegiatan ekonomi sejenis untuk mengelompok pada suatu lokasi karena adanya sesuatu keuntungan. Selanjutnya akan menyebabkan timbulnya pusat-pusat wilayah.
4. Faktor investasi pemerintah
Ketiga faktor diatas menyebabkan timbulnya pusat-pusat wilayah secara alamiah. Sedangkan aktor investasi pemerintah merupakan sesuatu yang sengaja dibuat.

2.2.1 Skalogram

Analisis skalogram adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pada suatu daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wilayah yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat maka wilayah tersebut semakin tinggi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dimaksud adalah ketersediaan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah tersebut seperti fasilitas yang berkaitan dengan ekonomi, aktivitas sosial dan pemerintahan (Nainggolan, 2013).

Analisis yang digunakan untuk menentukan pusat dan sub pusat pelayanan wilayah disebut analisis pusat pelayanan. Pusat pelayanan merupakan pusat dari segala kegiatan-kegiatan antara politik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi. Kegiatan tersebut dijalankan melalui jasa pelayanan yang diberikan oleh

fasilitas-fasilitas umum maupun sosial yang ada didalamnya. Jika dilihat dari fungsinya, pusat wilayah merupakan tempat sentral yang bertindak sebagai pusat pelayanan bagi daerah-daerah dibelakangnya dan penyuplai barang dan jasa bagi wilayah tersebut (Cahya dkk, 2020)

2.2.2 Model Gravitasi

Hubungan interaksi antara dua lokasi dapat dijelaskan melalui pendekatan model gravitasi, di mana setiap lokasi dianggap sebagai massa tertentu dengan sifat gaya tarik. Dalam konteks ini, jumlah penduduk seringkali dijadikan sebagai ukuran massa suatu lokasi. Volume kegiatan ekonomi dalam batas tertentu juga dapat menjadi indikator massa suatu lokasi, meskipun dalam penelitian ini, fokus utama diberikan pada jumlah penduduk sebagai representasi massa. Semakin besar jumlah penduduk suatu lokasi, semakin besar pula gaya tariknya. Lokasi dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi cenderung lebih menarik bagi individu untuk mencari pekerjaan dan mencari kehidupan yang lebih baik. Kota metropolitan, sebagai contoh, memiliki daya tarik yang lebih besar dibandingkan dengan kota kecil, karena menawarkan peluang pekerjaan yang lebih luas dan harapan kehidupan yang lebih baik (Setiono, 2011).

Selain massa lokasi, intensitas daya tarik antara dua lokasi juga dipengaruhi oleh jarak di antara keduanya. Semakin dekat jarak antara dua lokasi, semakin besar daya tarik yang terjadi di antara keduanya. Sebaliknya, semakin besar jarak antara dua lokasi, semakin kecil intensitas daya tarik antara keduanya, dengan hubungan yang berbanding terbalik antara daya tarik dan jarak (Setiono, 2011).

2.3 Komoditas Unggulan

Pengertian dan konsep komoditas unggulan dapat dilihat dari dua sisi yaitu permintaan dan penawaran. Dilihat dari sisi penawaran, komoditas unggulan adalah komoditas yang menunjukkan pertumbuhan paling unggul dalam hal kondisi bio-fisik, teknologi, dan kondisi sosial ekonomi petani di suatu wilayah tertentu. Kondisi sosial ekonomi ini meliputi penguasaan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur seperti pasar, serta kebiasaan para petani setempat. Dari sisi permintaan, komoditas unggulan merupakan komoditas yang mempunyai permintaan yang kuat baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional dan keunggulan kompetitif (Syafaat dan Sufena, 2000).

Pada dasarnya, komoditas unggulan adalah komoditas yang cocok dengan agroekologi setempat dan memiliki daya saing tinggi, baik di pasar lokal, pasar nasional, maupun pasar internasional. Komoditas unggulan yang dikembangkan dapat dibagi menjadi dua kelompok utama. (Hanafiah, 1999), yaitu:

a. Komoditas unggulan basis ekonomi

Komoditas unggulan dikembangkan dalam kerangka pengembangan ekonomi dengan orientasi pasar yang mencakup pasar lokal, regional, nasional, dan internasional. Konsep efisiensi teknis dan ekonomis, serta keunggulan komparatif dan kompetitif, menentukan pertumbuhan komoditas ini melalui kemampuannya bersaing di pasar nasional dan internasional.

b. Komoditas unggulan non basis ekonomi.

Komoditas unggulan dikembangkan dalam kerangka stabilitas sosial, ekonomi, dan politik yang lebih berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pasar domestik. Komoditas dalam kelompok kedua ini dikenal sebagai komoditas strategis. Jadi, komoditas strategis adalah komoditas unggulan yang dikembangkan untuk mendukung stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, serta lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan pasar dalam negeri.

Komoditas unggulan diartikan sebagai komoditas yang potensial dan strategis dalam pengembangan wilayah dengan keunggulan sumber daya alam. Komoditas unggulan memiliki kriteria sebagai berikut: (Absyari, 2020):

1. Komoditas unggulan menjadi penggerak utama dalam pembangunan perekonomian, artinya komoditas unggulan merupakan kontributor yang cukup besar pada peningkatan produksi dan pendapatan daerah suatu wilayah.
2. Komoditas unggulan dapat menyerap secara optimal sesuai dengan skala produksi.
3. Komoditas unggulan memiliki pemasaran yang bertahan dengan jangka waktu lama serta mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain.
4. Komoditi unggulan perlu memiliki dukungan atau perhatian khusus dari pemerintah setempat, misalnya dukungan informasi, peluang pasar dan - lain-lain. Komoditi unggulan perlu memiliki dukungan atau perhatian khusus dari pemerintah setempat, misalnya dukungan informasi, peluang pasar dan lain-lain.

2.3.1 Location Quotient (LQ)

Menurut Hood di dalam Hendaya (2003), Location Quotient adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan.

Dengan pendekatan LQ, dapat diketahui sektor pertanian mana yang dianggap komoditas unggulan (basis) dan komoditas bukan unggulan (non basis). Manfaat pendekatan tersebut adalah diketahuinya dengan pasti sektor apa saja yang termasuk basis dan bukan basis serta sektor-sektor lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan sehingga berpeluang untuk menjadi sektor basis di suatu wilayah khususnya oleh pemerintah daerah. Sektor basis dapat meningkatkan perekonomian wilayah sedangkan sektor non basis sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat). sektor basis merupakan kegiatan yang mengekspor barang dan atau jasa keluar batas-batas perekonomian wilayah yang bersangkutan sedangkan sektor non basis menyediakan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan di dalam batas-batas perekonomian wilayah tersebut (memenuhi pasar lokal) (Alhaq dalam Kusyaerii dkk, 2017).

Dengan mengetahui keunggulan komparatif maka strategi pengembangan wilayah dapat diarahkan dan difokuskan kepada upaya untuk mengembangkan implementasi dan pemanfaatan dari keunggulan tersebut agar dapat mendorong peningkatan daya saing produknya di pasar regional dan pasar global. Pada ranah yang lebih rinci, keunggulan komparatif tersebut dapat diuraikan menjadi produk unggulan atau spesialisasi kegiatan untuk menghasilkan produk unggulan tertentu (Setiono, 2011)

2.4 Tinjauan Empiris

Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang dijadikan sebagai pedoman maupun landasan pada penelitian ini:

Tabel.1 Tinjauan Empiris

No	Nama Peneliti	Judul	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	Apriana dan Rudianto (2020)	Penentuan Pusat Pelayanan Perkotaan di Kota Tanjung Pinang	Analisis <i>Central Place Christaller</i> , analisis skalogram dan analisis interaksi keruangan	Hasil analisis skalogram dan interaksi keruangan yang telah dilakukan, kecamatan yang berpotensi menjadi pusat pelayanan di Kota Tanjungpinang adalah Kecamatan Tanjungpinang Timur, karena memiliki fasilitas terbanyak dan terlengkap di antara kecamatan yang lain, yakni 23 jenis fasilitas sebanyak 550 unit. Kecamatan Tanjungpinang Timur juga memiliki potensi untuk berkembang. Hal tersebut didukung oleh nilai interaksi ke Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah paling tinggi sebesar 236,428,545.
2	Muiana dkk (2018)	Kajian Pusat-Pusat Pelayanan Di Kabupaten Kampar	Analisis skalogram dan indeks sentralitas	Hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas tidak terdapat hirarki II dan hirarki III sehingga terjadi pemusatan fasilitas pada hirarki I yakni Kota Bangkinang sebagai ibukota Kabupaten. Setelah dibandingkan struktur pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Kampar berdasarkan draft RTRW dengan analisis skalogram dan indeks sentralitas, maka direkomendasikan struktur pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Kampar terdiri dari 5 hirarki yaitu hirarki I berada di Kecamatan Bangkinang Kota, hirarki II berada di Kecamatan Tapung, Kampar Kiri, Siak Hulu, dan Tapung Hulu, hirarki III berada di Kecamatan Tapung Hilir, Kampar Kiri Hilir, dan XIII Koto Kampar, hirarki IV berada di Kecamatan Bangkinang, Gunung Sahilan, Perhentian Raja, Salo, dan Kampar, hirarki V berada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Rumbio Jaya, Kuok, Kampar Timur, Koto Kampar Hulu, Tambang, Kampar Utara, dan Kampar Kiri Hulu.

Lanjutan Tabel 1.

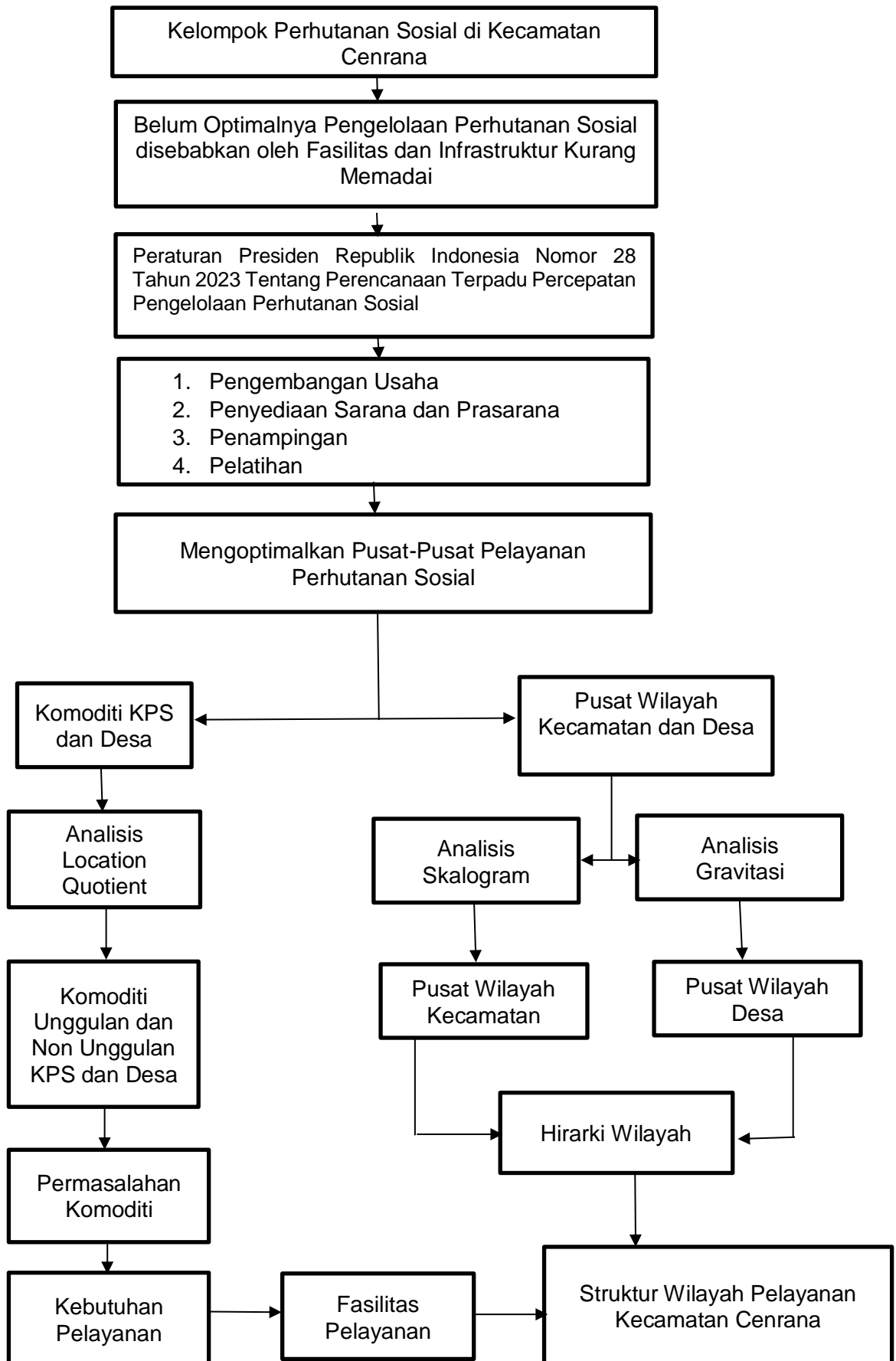
3	Wusqa dkk (2021)	Analisis Penentuan Pusat Pusat Pertumbuhan dan Komoditi Basis Pertanian Subsektor Perkebunan di Kabupaten Sijunjung	Indeks sentralitas, skalogram dan LQ	<p>Hierarki ketersediaan fasilitas penunjang pertanian di Kabupaten Sijunjung dibagi atas 4 hierarki, hierarki pertama dapat diartikan sebagai daerah/kecamatan yang memiliki jumlah fungsi/ nilai indeks sentralitas yang sangat tinggi, Kecamatan yang berada di hierarki pertama yaitu Kecamatan Kamang Baru dengan nilai indeks sentralitas 719,9 komoditi prioritas di wilayah ini pertama kelapa sawit, selanjutnya Kecamatan Koto VII dengan indeks sentralitas 682,5 disusul Kecamatan Sijunjung di hierarki ke tiga, Kecamatan Kupitan, IV Nagari, Sumpur Kudus dan Tanjung Gadang di hierarki ke empat, yang artinya kecamatan ini masih minim jenis fasilitas penunjang pertanian.</p> <p>Komoditi basis perkebunan di Kabupaten Sijunjung yang berada di prioritas pertama ada komoditi kelapa sawit di Kecamatan kamang Baru, komoditi karet di Kecamatan Sijunjung, IV Nagari, Kupitan, Koto VII dan Lubuk Tarok. Komoditi perkebunan prioritas kedua ada komoditi karet dan kulit manis di Kecamatan Tanjung Gadang, komoditi kopi, kulit manis dan kakao di Kecamatan Sijunjung, komoditi kakao di Kecamatan Lubuk Tarok, komoditi perkebunan kelapa dan kakao di Kecamatan Kupitan, dan komoditi karet, kelapa, kulit manis di Kecamatan Sumpur Kudus. Komoditi perkebunan prioritas ketiga ada komoditi kelapa, kopi dan kakao di Kecamatan Tanjung Gadang, komoditi kelapa di Kecamatan Sijunjung, komoditi kelapa dan kopi di Kecamatan Lubuk Tarok, komoditi kelapa dan kopi di Kecamatan IV Nagari, komoditi kopi di Kecamatan Kupitan, komoditi kelapa di Kecamatan Koto VII, komoditi kopi dan kakao di Kecamatan Sumpur Kudus.</p>
---	------------------	---	--------------------------------------	---

2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Kecamatan Cenrana memiliki luas sebesar 1.745 ha pada Kemitraan Konservasi sebesar 287,99 ha, Hutan Kemasyarakatan sebesar 1415,6 ha dan Hutan Desa 42 ha. Masyarakat pada desa Kecamatan Cenrana banyak memanfaatkan kawasan hutan dengan bertani dan beternak. Kondisi di desa-desa Kecamatan Cenrana terdapat tingkat kesejahteraan masyarakat yang berbeda-beda. Fasilitas dan Infrastruktur yang kurang memadai mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan perhutanan sosial di Kecamatan Cenrana.

Akses jalan yang rusak, tidak tersedianya pasar di beberapa desa dan kurangnya akses terhadap teknologi mengakibatkan serapan produksi petani menjadi rendah, biaya produksi tinggi dan sumber daya manusia kurang terampil. Hasil Penelitian Musdalifah (2023), faktor pendorong pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Cenrana Baru yaitu adanya sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana dan prasarana dapat menunjang kegiatan masyarakat dalam mengelola PS. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada kegiatan pengembangan *integrated area development* (IAD) meliputi: (a) perluasan distribusi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; (b) pengembangan usaha; (c) penyediaan sarana dan prasarana; (d) Pendampingan; (e) pelatihan; dan/atau (d) penelitian dan pengembangan.

Mengoptimalkan pusat-pusat pelayanan pada lokasi PS dapat membantu jalannya kegiatan perhutanan sosial di desa-desa. Sehingga dirumuskan struktur wilayah pelayanan perhutanan sosial di Kecamatan Cenrana dengan menganalisis komoditi unggulan PS dan desa dan pusat-pusat wilayah. Komoditi unggulan KPS dan desa dilakukan analisis *Location Quotient* (LQ) sehingga diketahui komoditi unggulan dan non unggulan di tiap KPS dan Desa. Berdasarkan hasil tersebut maka dikaji permasalahan dan kebutuhan pada pada setiap komoditi sehingga diperoleh jenis-jenis pelayanan di tiap KPS dan Desa. Pada pusat-pusat wilayah menggunakan analisis skalogram dan gravitasi. Analisis skalogram mengetahui desa yang menjadi pusat pelayanan di tingkat kecamatan. Analisis gravitasi mengetahui dusun yang menjadi pusat pelayanan di tingkat desa. Berdasarkan dari hasil 3 analisis tersebut maka dapat diketahui struktur wilayah pelayanan perhutanan sosial di Kecamatan Cenrana.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian